

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dilansir dari website resmi PPID Kementerian Lingkungan Hidup (2017), Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kawasan mangrove terbesar di dunia yang mencakup sebesar 23 persen luas hutan mangrove dunia. Indonesia turut berkontribusi dalam upaya menjaga kawasan hijau dunia. Walaupun memiliki kawasan hutan mangrove yang besar, Indonesia sendiri memiliki angka kerusakan ekosistem kawasan hutan mangrove yang cukup tinggi yang berada di angka 1.817.999,93 Ha (PPID Kementerian Lingkungan Hidup, 2017). Upaya menjaga kawasan hijau dunia ini berbanding lurus dengan ancaman pemanasan global. Adapun pemanasan global bisa terjadi disebabkan banyaknya karbon yang tidak terserap yang salah satunya diakibatkan oleh rusaknya kawasan hijau yang berisi ekosistem hutan yang salah satunya adalah hutan mangrove.

Pemanasan global dan kerusakan kawasan hijau merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya diserahkan kepada salah satu pihak tertentu untuk mengatasinya karena yang menyebabkan pemanasan global merupakan semua pihak. Hal ini dikarenakan dampak ancaman pemanasan global bersifat masif dan bisa mengenai semua orang tanpa terkecuali. Adapun untuk pemanasan global dapat menimbulkan salah satunya fenomena cuaca ekstrim dan perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kelaparan akibat gagal panen cuaca ekstrim (PBB Indonesia, 2022). Kerusakan kawasan hijau tidak bisa di pandang sebelah

mata karena akan berpotensi mengganggu aktivitas manusia seperti adanya kerusakan wilayah hutan mangrove dapat mempengaruhi kegiatan masyarakat yang berada di kawasan pesisir karena berpotensi terkena abrasi dan banjir.

Adapun sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia memiliki kewajiban untuk berperan mengatasi pemanasan global. Oleh sebab itu salah satu upaya komitmen Indonesia dalam mengatasi pemanasan global diwujudkan dalam diplomasi mangrove yang diikuti oleh para aktor yang berperan untuk mensukseskan kegiatan diplomasi mangrove. Diplomasi mangrove sendiri merupakan adaptasi dari bentuk diplomasi lingkungan yang mengutamakan isu lingkungan hidup terutama terkait dengan ekosistem hutan mangrove. Adapun dalam kegiatan studi kasus diplomasi mangrove terdapat kesamaan yang menjadi ciri sebuah kegiatan dapat dikatakan diplomasi mangrove. Kegiatan itu antara lain adalah penanaman, upaya perbaikan, dan upaya pemeliharaan dan juga pelaku dalam kegiatan diplomasi mangrove biasanya berperan mewakili sektor sektor tertentu.

Terdapat tinjauan literatur dari penelitian sebelumnya yang menjadi pertimbangan dan mendasari penelitian ini untuk mengusung isu hn in diplomasi mangrove Indonesia karena memiliki beberapa relevansi. Dalam jurnal penelitian yang berjudul : Diplomasi Iklim Upaya menyelamatkan bumi dari krisis iklim ? karya dari Adi Subiyanto tahun 2024. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori diplomasi iklim, menjelaskan bahwa pemanasan global telah menyebabkan krisis iklim Sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan. Fenomena pemanasan global yang memicu

terjadinya krisis iklim merupakan bagian dari isu lingkungan. Adapun dalam penelitian ini tidak membahas mengenai diplomasi mangrove melainkan hanya sebatas lingkungan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa krisis iklim harus dipandang sebagai musuh bersama dan perlu disadari oleh komunitas internasional sebagai krisis nyata sehingga mendorong semua pihak untuk melakukan aksi kolaborasi untuk menanganinya.

Dalam jurnal penelitian yang berjudul : Diplomasi Perubahan Iklim Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 karya dari Kuswardini dkk., tahun 2022. Dalam penelitiannya penulis menggunakan teori diplomasi perubahan iklim, penulis menjelaskan bahwa hambatan Indonesia terhadap penerapan kebijakan perubahan iklim masih dalam tahap integrasi kebijakan ke level daerah dan berbagai sektor serta pendanaan yang tidak bisa ditanggung negara sendiri. Dalam penelitian ini menjelaskan juga bahwa isu perubahan iklim terus disuarakan oleh pemerintah Indonesia secara konsisten

Dalam jurnal yang berjudul : Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia : Isu Mitigasi Perubahan Iklim karya dari Firdaus dan Wandira, tahun 2022. Dalam penelitiannya penulis menggunakan teori diplomasi lingkungan. Penulis menjelaskan bahwa Mengingat gentingnya permasalahan perubahan iklim, upaya penanggulangannya sudah tidak dapat ditunda lagi. Tanpa ada komitmen yang melebihi sikap diplomatik negara, permasalahan ini mungkin tidak dapat diselesaikan. Sebagai anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB dalam menghadapi Perubahan Iklim, Indonesia memiliki beban internasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan ini, tidak dapat dicapai jika Indonesia

masih belum bisa dicapai jika Indonesia sendiri masih belum transparan. Lebih pentingnya lagi, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya

Berdasarkan pertimbangan dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis semakin yakin terkait relevansi penggunaan teori diplomasi mangrove untuk menjelaskan upaya Indonesia secara nyata dalam menanggapi isu pemanasan global melalui diplomasi multi jalur dan penggunaan jalur satu yang mana aktor/pelaku diplomasi adalah pemerintah, jalur tiga yang merupakan sektor bisnis, jalur empat masyarakat sipil, jalur delapan yang merupakan filantropis atau pendonor dana, dan yang terakhir jalur sembilan yang merupakan media dan komunikasi.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menjabarkan upaya apa saja yang diambil oleh Indonesia dalam rangka melaksanakan diplomasi multi jalur dalam studi kasus diplomasi mangrove untuk menjawab isu tantangan pemanasan global pada era presiden Joko Widodo tahun 2019-2023 mengingat tidak semua negara memiliki kawasan hutan mangrove. Adapun penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat menjelaskan fungsi atau manfaat yang diperoleh Indonesia melalui diplomasi multi jalur dalam studi kasus diplomasi mangrove dan kontribusi Indonesia dalam menanggapi isu pemanasan global.

1.2 Rumusan Masalah

Menimbang dari penjelasan latar belakang penelitian ini rumusan masalah yang penulis angkat adalah : **Bagaimana upaya Indonesia dalam melaksanakan diplomasi mangrove tahun 2019-2023 melalui diplomasi multi jalur ?**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Secara Umum

Secara umum Tujuan penelitian ini akan digunakan sebagai pemenuhan gelar S1 jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur.

1.3.2. Secara Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperkaya kepustakaan yang membahas tentang diplomasi lingkungan terutama yang membahas terkait diplomasi mangrove dan diplomasi multi jalur sebagai aktor pelaku kegiatan diplomasi di tahun 2019-2023. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca dan peneliti terkait manfaat yang didapatkan aktor diplomasi dalam menjalankan diplomasi lingkungan dalam bentuk diplomasi mangrove dan kontribusi Indonesia dalam menanggapi isu pemanasan global.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1. Environment Diplomacy

Menurut Andreas Pramudianto (2008) diplomasi lingkungan atau *environmental diplomacy* adalah diplomasi yang muncul karena persoalan lingkungan hidup yang diangkat menjadi persoalan politik global. Menjadi salah satu negara dengan kawasan hijau terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekuatan untuk menyuarakan terkait dengan masalah lingkungan hidup dalam politik dan persoalan global.

Selain itu terdapat sebuah penelitian lain yang juga berpendapat bahwa diplomasi lingkungan menjadi sebuah alat dan metode untuk mengatasi masalah lingkungan melalui sebuah upaya kerjasama (Susanti & Purbantina, 2017). Upaya kerjasama yang terjadi di dalam kegiatan diplomasi mangrove antara lain adalah penanaman, pemeliharaan dan juga perbaikan kawasan hutan mangrove

Pilar utama adanya diplomasi lingkungan adalah untuk mencari solusi terkait dengan kondisi lingkungan global (Carroll, 1988,). Dalam hal ini diplomasi mangrove merupakan bentuk upaya mencari solusi dari tingginya akan kerusakan kawasan hutan mangrove.

Oleh sebab itu, penggunaan teori diplomasi lingkungan yang dalam aplikasinya berupa diplomasi mangrove dalam upaya nyata Indonesia terhadap isu pemanasan global merupakan pilihan yang tepat karena dapat menjelaskan kaitan antara fenomena pemanasan global dan peran ekosistem hutan mangrove dalam menanganinya . Mengingat diplomasi mangrove diisi dengan kegiatan menanam, perbaikan, dan pemeliharaan hutan mangrove. Penanaman mangrove sendiri

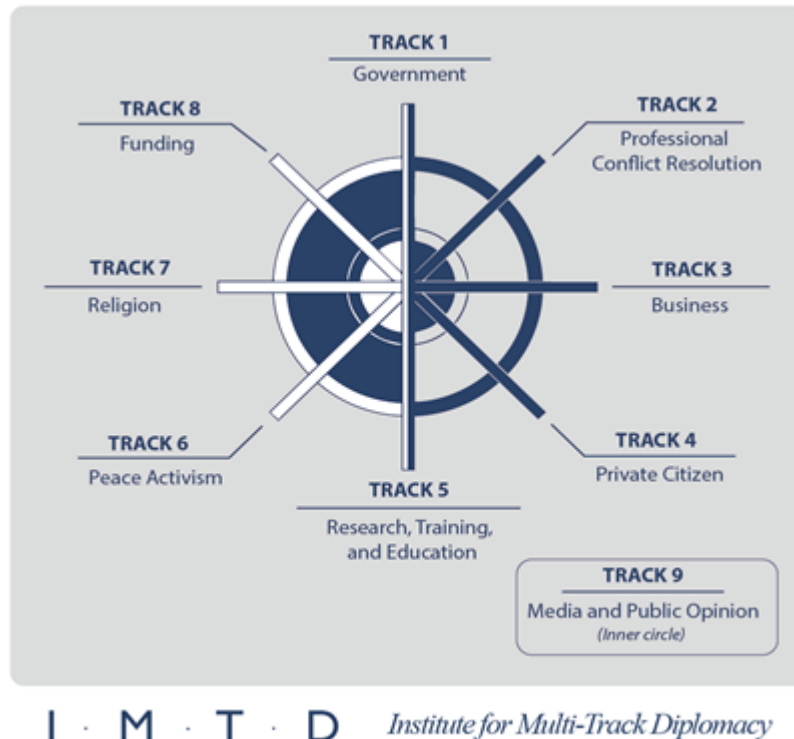
memiliki fungsi untuk mencegah abrasi, menyerap karbon dan memproteksi lahan yang merupakan bentuk kepedulian Indonesia terhadap tantangan isu pemanasan global (Gunawan et al., 2022). Jadi dapat dipahami bahwa diplomasi lingkungan dalam bentuk kegiatan diplomasi mangrove selaras dengan agenda politik global yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kawasan hijau dunia.

1.4.2. Diplomasi Multi Jalur

Diplomasi multi jalur merupakan perkembangan bentuk diplomasi kuno yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai diplomat dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Seiring dengan perkembangan zaman diplomasi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu mulai dilakukan tidak hanya oleh pemerintah namun berbagai kalangan yang terbagi menjadi 9 kalangan pelaku diplomasi yang dikenal dengan diplomasi multi jalur (Diamond & McDonald, 1996). Hal ini bisa terjadi karena pemerintah dirasa tidak memiliki kapasitas untuk berperan lebih terhadap isu-isu yang semakin beragam sehingga ke 9 golongan pelaku ini dapat berupaya untuk membantu pemerintah dalam menjawab isu-isu yang baru termasuk juga dengan kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Diplomasi multi jalur sendiri pertama kali diperkenalkan memiliki 5 jalur pada tahun 1991 oleh Dr. Louise Diamond & Duta Besar McDonald. yang akhirnya menambahkan 4 jalur baru sehingga menjadi 9 dan juga mendeskripsikan sembilan jalur ini dengan peran dan fungsinya masing-masing

sebagai berikut (McDonald & Journal of Conflictology, 2012) :



Gambar 1.1 Sistem Diplomasi Multi Jalur

Sumber : (McDonald & Journal of Conflictology, 2012)

Jalur 1-Pemerintah, berkontribusi menyelesaikan konflik dengan cara diplomasi melalui forum forum diplomasi resmi, pembuatan peraturan kebijakan dan kesepakatan serta upaya perdamaian dengan perwujudan melalui kegiatan formal dan bersifat prosesi pemerintahan

Jalur 2-Non Government Organisation atau upaya perdamaian melalui resolusi konflik. Ini adalah ranah aksi non-pemerintah profesional yang berusaha menganalisis, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik internasional oleh aktor-aktor non-negara.

Jalur 3-Sektor Bisnis mengupayakan perdamaian dengan melakukan kegiatan perdagangan. Bidang bisnis berperan dalam mengupayakan perdamaian melalui pembangunan perdamaian itu sendiri dengan cara menyediakan kesempatan dan peluang terhadap kegiatan ekonomi. Yang diwujudkan melalui kerjasama internasional berupa perjanjian investasi, hubungan dagang, kemitraan, dan forum komunikasi informal sebagai bentuk dukungan untuk pembuatan kegiatan perdamaian

Jalur 4-Masyarakat Sipil sebagai Pribadi Warga Negara, atau upaya perdamaian melalui keterlibatan pribadi. Jalur ini mencakup berbagai cara agar setiap warga negara dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan perdamaian dan pembangunan melalui diplomasi warganegara, program pertukaran, organisasi sukarela swasta yang sesuai dengan minat, organisasi non pemerintah, dan kelompok dengan peminatan khusus.

Jalur 5-Lembaga Penelitian Pelatihan dan Pendidikan terbagi menjadi tiga dan terhubung satu dengan yang lain dengan program universitas sebagaimana program kegiatan pelatihan di isi dengan adanya kegiatan berupa pelatihan keterampilan dalam bernegosiasi, mediasi, resolusi konflik serta wadah untuk pihak ketiga. termasuk taman kanak-kanak melalui program PhD yang mencakup berbagai aspek studi global atau lintas budaya, studi perdamaian dan tatanan dunia, dan analisis konflik, manajemen, dan resolusi.

Jalur 6-Aktivis Perdamaian Aktivisme, atau upaya perdamaian melalui Advokasi. Jalur ini mencakup bidang perdamaian dan aktivisme lingkungan tentang isu-isu seperti pelucutan senjata, hak asasi manusia, keadilan sosial dan

ekonomi, dan advokasi kelompok-kelompok berkepentingan khusus mengenai kebijakan pemerintah yang spesifik

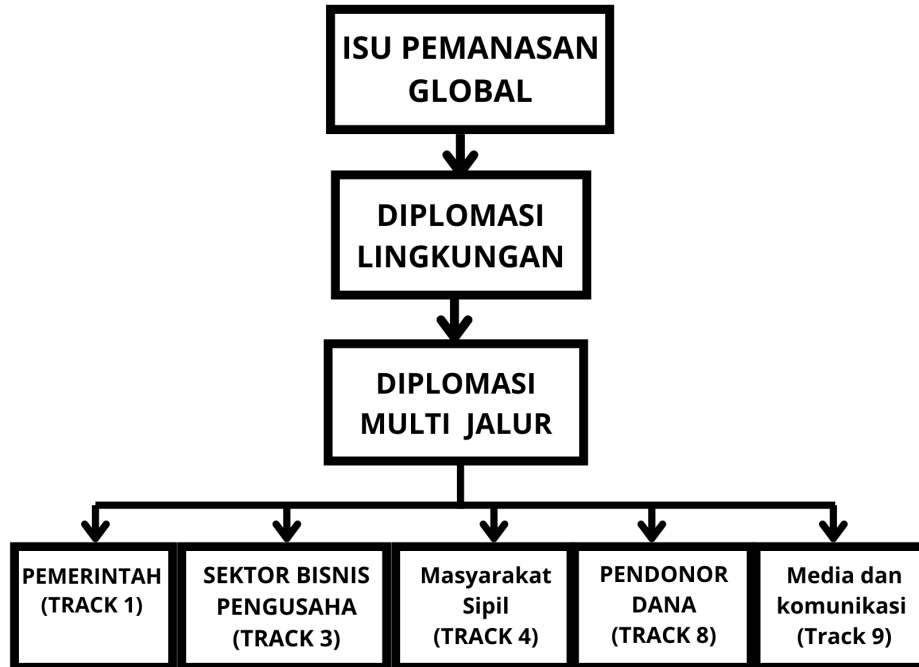
Jalur 7-Lembaga & Kelompok Keagamaan, atau upaya perdamaian melalui aksi keagamaan. Jalur ini mengkaji keyakinan dan tindakan damai dari komunitas spiritual dan agama dan gerakan berbasis moralitas seperti pasifisme, perlindungan, dan non-kekerasan.

Jalur 8-Pendonor Dana (Filantropi), atau upaya perdamaian melalui penyediaan sumber daya. Ini merujuk pada komunitas pendanaan - yayasan dan filantropis individual yang memberikan dukungan finansial untuk banyak kegiatan yang dilakukan oleh jalur lain.

Jalur 9-Media & Komunikasi, berisi upaya perdamaian melalui informasi. Ini adalah ranah suara rakyat: meliputi bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh media-cetak, film, video, radio, sistem elektronik, dan seni.

Adapun penelitian ini menggunakan diplomasi multi jalur pada jalur pertama, ketiga, keempat, kedelapan, kesembilan karena dirasa memiliki korelasi dan pengaruh dalam upaya diplomasi mangrove Indonesia dalam menanggapi isu tantangan pemanasan global.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 : Sintesa Pemikiran

Tabel sintesa pemikiran yang penulis susun merupakan penjelasan alur terkait diplomasi lingkungan Indonesia yang muncul untuk menjawab isu tantangan pemanasan global selama tahun 2019 - 2023 yang di dalam penerapannya berupa diplomasi mangrove yang dilaksanakan dengan metode diplomasi multi jalur dengan pemerintah, sektor pengusaha, sektor masyarakat sipil, pendonor dana, dan sektor media komunikasi sebagai aktor yang berperan dalam melaksanakan diplomasi. mengingat ekosistem hutan mangrove merupakan hal yang langka dan tidak dimiliki oleh semua negara yang manfaatnya bisa muncul sebagai jawaban atas isu pemanasan global yang merupakan musuh bersama yang tidak bisa hanya diatasi oleh pemerintah.

1.6 Argumen Utama

Pelaksanaan diplomasi mangrove yang dilakukan Indonesia terjadi melibatkan aktor multi jalur. melibatkan elemen lapisan pemerintah, masyarakat sipil, sektor bisnis, pendonor dana, dan media komunikasi. Adapun pelibatan aktor selain pemerintah dikarenakan isu pemanasan global dipandang sebagai musuh bersama dan upaya menanggapi isu pemanasan global tidak cukup dikerjakan hanya oleh pemerintah. Melalui peran masing masing aktor diharapkan juga bisa memberi dampak yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki.

Jalur diplomasi pertama (Pemerintah) digunakan untuk membuktikan kepada negara internasional terkait upaya nyata Pemerintah Negara Indonesia untuk turut berperan dalam mengatasi tantangan pemanasan Global. adapun jalur pemerintah dalam diplomasi multi jalur penelitian ini mengacu secara spesifik kepada beberapa kegiatan internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2020, Pekan Diplomasi Iklim 2021, dan beberapa kegiatan formal pemerintahan lainnya.

Jalur ketiga yang merupakan sektor bisnis dalam kesempatan ini berperan dalam menggunakan diplomasi mangrove untuk kegiatan kerjasama ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah pembangunan kawasan wisata bahari mangrove yang menghasilkan kesempatan ekonomi berupa adanya kunjungan wisatawan serta kesempatan usaha pariwisata yang diikuti dengan pemanfaatan sumber daya alam dari ekosistem hutan mangrove. Adapun jalur bisnis dalam diplomasi multi jalur penelitian ini mengacu secara spesifik kepada

munculnya Mega Mangrove Center Desa Wisata Bahari yang terletak di kota Brebes (Arfal, 2021).

Jalur ke empat yang merupakan masyarakat sipil dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelaku atau aktor yang mengeksekusi rancangan rancangan kegiatan diplomasi secara aktif.

Jalur kedelapan yang merupakan pendonor dana atau filantropis turut berperan dalam menjawab isu tantangan pemanasan global melalui kegiatan filantropis berupa menyediakan dana untuk kegiatan konservatif kawasan ekosistem hutan mangrove sebagai perwujudan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu tantangan pemanasan global. Adapun jalur filantropis dalam diplomasi multi jalur penelitian ini mengacu secara spesifik pada kegiatan aksi pendanaan pengadaan bibit mangrove oleh pihak pemerintah dan swasta dalam berbagai kegiatan seperti peduli bumi oleh astra group, kerjasama pendanaan pengusaha Amerika Indonesia, dan pendanaan asean japan untuk restorasi lahan gambut dan mangrove.

Jalur kesembilan yang merupakan sektor media dan komunikasi dalam penelitian ini berfungsi menjadi sarana penghubung antara pelaku atau aktor diplomasi agar semua pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Secara umum Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Penelitian ini termasuk menggunakan kategori metode deskriptif dimana penulis berusaha untuk menjelaskan terkait fenomena kegiatan diplomasi mangrove dengan rinci dan terstruktur mulai dari awal hingga akhir dengan harapan para pembaca dapat dengan mudah memahami alur fenomena diplomasi mangrove secara satu arah.

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dimulai dari tahun 2019 - 2023. Karena pada tahun 2019 merupakan tahun awal bagi Indonesia dibawah pemerintahan presiden Joko Widodo memperkenalkan mangrove sebagai aset diplomasi Indonesia melalui beberapa kegiatan formal pemerintahan. Tahun 2023 dipilih karena merupakan tahun efektif pemerintahan Joko Widodo sebelum memasuki tahun pemilu 2024.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bahan baku utama dalam membuat penelitian dan kualitas dari penelitian ditentukan dari kualitas bahan bakunya atau darimana sumber datanya. data yang saya gunakan dalam penelitian kali ini dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Gunawan Suryoputro (2012) dalam buku menulis artikel untuk jurnal ilmiah menjelaskan bahwa Data sekunder sendiri

merupakan data yang didapat melalui jurnal ilmiah, buku dan dokumen pemerintah termasuk situs resmi

Penelitian ini didukung dengan data sekunder yang didapatkan melalui berbagai macam sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun data sekunder bisa dipahami sebagai teknik pengumpulan data yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dibuat oleh para peneliti di masa yang sudah lalu.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data wajib untuk dilakukan analisa sebagai salah satu bentuk riset dan kajian mendalam terkait korelasi antara data dengan fenomena sosial yang ada yang hendak dijadikan subjek maupun objek penelitian. Kemampuan berpikir kritis dalam menganalisa data yang ada dilakukan agar penulis mampu memahami pokok penelitian secara lebih mendalam. Menurut Gunawan Suryoputro (2012) yang merupakan salah satu penulis buku menulis artikel untuk jurnal ilmiah berpendapat bahwa analisis data sejatinya menjadi salah satu tolak ukur utama kualitas sebuah penelitian yang dibuat. Hal ini sangat berhubungan karena dalam bagian ini terlihat bagaimana seorang penulis mampu untuk menyusun data yang didapat menjadi alur yang tertata sesuai dengan waktu dan alasan dibalik setiap fenomena yang terjadi dalam pokok bahasan penelitian yang ada. Sehingga baik para pembaca maupun penulis dapat mengerti dan mudah untuk menarik poin poin utama dan hasil akhir berupa kesimpulan penelitian tanpa merasa bingung terkait korelasi data dan fenomena yang dibahas.

1.7.5. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan tiap tiap bab dan isi didalam bab itu sendiri :

Bab I akan menjelaskan bagian pengenalan yang mana didalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama hingga metode penelitian yang menjadi alat bantu penulis menyelesaikan penelitian.

Bab II Berisi penjelasan peran para aktor diplomasi multi jalur Indonesia dalam pelaksanaannya melalui studi kasus diplomasi mangrove yang meliputi track (1,3,4) sebagai bentuk jawaban akan tantangan pemanasan global

Bab III Berisi penjelasan peran para aktor diplomasi multi jalur Indonesia dalam pelaksanaannya melalui studi kasus diplomasi mangrove yang meliputi track (8,9) sebagai bentuk jawaban akan tantangan pemanasan global

Bab IV menyajikan hasil analisis penelitian dari penulis berupa kritik, saran dan kesimpulan. Untuk para pembaca dan akademisi serta peneliti selanjutnya.